BAB II

TEORI DASAR TENTANG *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI INDONESIA

A. Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Para yurist positivis mendoktrinkan *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah “Negara yang menata seluruh kehidupan didalamnya berdasarkan atas aturan-aturan hidup yang telah dipositifkan secara formal sebagai undang-undang, yang oleh sebab itu telah berkepastian sebagai satu-satunya hukum yang berlaku di suatu wilayah negeri.” Selain itu juga, Aristoteles merumuskan bahwa Negara Hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamn keadilan kepada warga negaranya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, menurut A.V. Dicey ada 3 (tiga) prinsip yang harus dilaksanakan dalam negara hukum, yaitu: 1). Supremasi Hukum (*Supremacy Of Law*), 2). Kesetaraan di depan hukum (*Equality Before The Law*), dan 3). Human Right.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terbentuk dari gejala sosial yang sering terjadi di masyarakat. Dari sekian banyak gejala sosial yang terjadi di masyarakat seringkali gejala sosial tersebut menjadi semakin tidak terkendali, maka diperlukan adanya penegakan hukum guna tercapainya kepastian hukum. Dalam Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 jelas di katakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya .*” maksudnya adalah bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam halnya penegakan hukum atas permasalahan hukum, khususnya dalam permasalahan tindak pidana yang dialaminya.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya, yaitu:²⁸

1. Hukum;
2. Penegak Hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat; dan
5. Kebudayaan

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *Strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*, secara literlijk kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” yang artinya dapat atau boleh, dan “*feit*” yang adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *Strafbaarfeit* secara utuh ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa,

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, cet.12, hlm.8

pelanggaran, dan perbuatan.²⁹ S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut:³⁰

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab”.

Dalam menentukan suatu perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, menurut Moeljatno, kita menganut asas legalitas (*Principle Of Legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) sebelum orang dituntut atas tindak pidana karena perbuatannya.³¹ Selain itu juga, didalam asas tersebut juga mengandung asas “*Nullum Delictum Sine Praevia Lege Poenali*” yang memiliki arti tiada delik tiada pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan dan mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal atau positif”. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi dan menurut rasa keadilan, diakui adanya asas “tiada tindak pidana dan pidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil)” atau asas “sifat melawan hukum yang negatif”. Asas ini disebut juga dengan asas “ketiadaan sifat melawan hukum” (*the absesnce of of unlawfulness*).³²

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.69

³⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta 2012, hlm.18-19

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.5

³² Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti, *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, *Journal Article*, FH UNDIP, Semarang, 2019, hlm.29

Berdasarkan aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP) Tindak pidana yang ada di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah tindak pidana yang dilihat dari bentuk kesalahannya, dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Dalam hal ini yang sering terjadi di Indonesia yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*), contoh Pasal 338- Pasal 350 KUHP tentang pembunuhan, baik pembunuhan yang direncanakan ataupun tidak direncanakan oleh pelaku.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah rakyat terbanyak di dunia. Hal tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana. Secara luas, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan memiliki sanksi bagi orang yang melakukannya. Pengertian tindak pidana ini tidak diatur secara khusus dan jelas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³³ Tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia seperti tindak pidana perampokan, penjambretan, penipuan, penganiayaan bahkan tindak pidana yang dapat mengakibatkan luka terhadap korban sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu tindak pidana pembunuhan.

³³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155.

Latar belakang dari terjadinya pembunuhan di Indonesia sangatlah beragam. Biasanya tindak pidana pembunuhan ini terjadi karena dendam, cemburu, atau memang sudah direncanakan sebelumnya oleh pelaku. Pengertian tindak pidana pembunuhan secara luas yaitu suatu tindakan perampasan nyawa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan meninggalnya orang tersebut. Pembunuhan sendiri berasal dari kata ‘bunuh’ yang artinya mematikan atau membuat mati atau menghilangkan nyawa. Membunuh berarti orang yang melakukan suatu perbuatan mematikan, menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Pembunuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melanggar hukum.³⁴

Tindak pidana pembunuhan ini sebelumnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 338 KUHP yang mana rumusan Pasalnya sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, sedangkan menurut Poerwadarminta (1985:169), pembunuhan berasal dari kata bunuh yang mendapat awalan pe dan akhiran an yang maksudnya adalah mematikan, menghilangkan (mencoret), tulisan memadamkan api.³⁵ Maka bisa kita lihat dari kedua pengertian mengenai tindak pidana pembunuhan itu sendiri memiliki

³⁴ Endang Rahmawati, *Pembunuhan Berencana*, dalam Repository.Ump.ac.id, <http://repository.ump.ac.id/2296/3/ENDANG%20-%20BAB%20II.pdf>, diunduh pada Jumat, 18 Februari 2021, 16.33 WIB

³⁵ Ahyar Bakri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*, Bandung, 28 Januari 2021

arti yang berbeda dari segi yuridis dan bahasa. Dari segi yuridis jelas bahwa objek pembunuhan itu sendiri adalah manusia, sedangkan dari segi bahasa objek dari memadamkan api atau pembunuhan itu bukan hanya manusia tapi seluruh yang bernyawa.

Pembunuhan yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Bandung selama tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 100%. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Komisararis besar Iman Sugema bahwa pada tahun 2018 tidak terjadi kasus pembunuhan alias nol sedangkan ditahun 2019 kasus pembunuhan yang terjadi sebanyak 47 kasus.³⁶ Maka berdasarkan data tersebut penegakan hukum dalam tindak pidana khususnya pembunuhan perlu dimaksimalkan agar dapat mencegah terjadinya peningkatan jumlah tindak pidana pembunuhan.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan yang sangat penting dan sangat berpengaruh di dalam negara hukum seperti Indonesia. Selain itu pengertian dari penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dan oleh setiap aparat yang mana mereka memang memiliki kewenangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku saat ini.³⁷

³⁶ Aziz Zulkhairil, *Selama 2018-2019 Kasus Pembunuhan di Kota Bandung Naik 100 Persen*, dalam IDN Times Jabar, <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/selama-2018-2019-kasus-pembunuhan-di-kota-bandung-naik-100-persen>, diunduh pada Senin, 01 Maret 2021, 15.00 WIB

³⁷ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.58

Menurut *Black Law Dictionary* penegakan hukum diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law* yang intinya adalah tindakan memberlakukan sesuatu seperti hukum, pelaksanaan hukum.³⁸ Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.³⁹ Menurut Sudarto, penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht In actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi.⁴⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, 2009 : VII-IX, Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.⁴¹

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, dibutuhkan instrumen penggerak yaitu institusi penegak hukum dan implementasinya yang dilakukan melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana

³⁸ M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara*; Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No. 1 / Juni 2017, hlm.23

³⁹ *Ibid*, hlm.24

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*.

(*Criminal Justis System*), dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP), Kekuasaan Kehakiman (kekuasaan penegakan hukum), dalam hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan atau kewenangan dalam halnya menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan dari penyidikan oleh badan atau lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh badan atau lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili oleh badan atau lembaga peradilan, dan pelaksanaan putusan pidana oleh badan atau lembaga masyarakat.

Polri merupakan salah satu institusi atau lembaga yang termasuk kedalam sistem peradilan pidana yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, didalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.⁴²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Polri adalah Penyidik dan Penyelidik. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, pengertian dari Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

⁴² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, cet.1, hlm.27

undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah (a). Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁴³ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP, pengertian dari Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyidik sebagai salah satu lembaga atau institusi peradilan di Indonesia memiliki banyak tugas dan fungsi, salah satunya yaitu bertugas membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas tersebut kepada jaksa penuntut umum dilakukan dimana pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Selanjutnya apabila proses penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.⁴⁴

Setelah penyidik memberikan barang bukti kepada penuntut umum, maka penuntut umum akan mengajukan kasus pembunuhan tersebut beserta barang bukti ke pengadilan dan kasus tersebut akan diproses hingga pada akhirnya hakim akan menjatuhkan putusan terhadap tersangka pembunuhan. Tugas hakim sesungguhnya adalah sebuah tugas yang mulia, sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh, tentang sebuah "Pergulatan Kemanusiaan."⁴⁵ Dalam

⁴³ Armunanto Hutahaean dan Erlin Indarti, *op.cit*, hlm.32

⁴⁴ Armunanto Hutahaean dan Erlin Indarti, *op.cit*, hlm.33

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif "Perang dibalik Toga Hakim"*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 91

pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa begitu besar tanggungjawab seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, dimana mereka harus menghadapi pergulatan batin serta gejolak dalam jiwanya ketika harus membuat suatu pilihan yang tidak mudah dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang diadilinya, dan lebih dari semua itu bahwa seorang hakim harus bisa meletakkan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat, dengan demikian sebuah putusan hakim merupakan cerminan dari sikap, moralitas dan banyak hal lain yang dideskripsikan sebagai pengalaman seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Maka pertimbangan seorang hakim merupakan hal yang akan berpengaruh dalam menjatuhkan putusan selain dari alat bukti yang telah diberikan oleh penyidik kepada penuntut umum.

B. Alat Bukti Yang Sah Sesuai Dengan Pasal 184 KUHAP

Kejahatan disamping sebagai masalah yuridis juga menjadi masalah teknis dan kemanusiaan. Sebagai masalah yuridis, kejahatan sebagai masalah yuridis merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan (peraturan) hukum pidana yang berlaku (hukum positif). Sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka ilmu yang dipergunakan untuk menangani masalah tersebut ialah hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga kedua ilmu tersebut merupakan soko guru atau ilmu yang pokok dalam penyelesaian kasus

kejahatan tanpa mengurangi peranan penting dari ilmu-ilmu lainnya diatas (Musa Perdana Kusuma, 1989:205-208).⁴⁶

Untuk dapat membuktikan suatu tindak pidana khususnya pembunuhan di persidangan, maka penyidik perlu mencari alat bukti. Untuk mendapatkan alat bukti tersebut, penyidik dapat meminta bantuan kepada ahli atau orang lain yang memiliki keahlian khusus. Dalam hal ini penyidik memerlukan bantuan dari seorang ahli atau dokter forensik atau dokter sesuai dengan sumpahnya sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”

Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk dipakai membuktikan suatu dalil atau dakwaan dalam sidang peradilan perdata atau pidana.⁴⁷ Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dan seperti yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

⁴⁶ Mangiliwati Winardi dan Tri Wahyuni, *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat*, Bandung, 24 Februari 2021

⁴⁷ Kusmayadi, S.H, *Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Menolak Pembuatan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, A.2121100, hlm.8

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan kedua Pasal diatas bahwa ada prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuktian. Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan “**dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah.**” maka batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang adalah dua alat bukti yang sah. Pada Pasal 184 KUHAP diatur mengenai alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat Petunjuk, dan
- d. Keterangan Terdakwa

Pasal 183 KUHAP diatas juga dikuatkan dengan adanya asas *unus testis nulus testis* yang berarti satu saksi bukan saksi, dimana bahwa alat bukti yang lain seperti alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli diperlukan dalam membuktikan suatu peristiwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi, maka dengan demikian *Visum Et Repertum* menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting kedudukannya dipersidangan dan juga sangat penting kedudukannya sebagai pertimbangan seorang hakim pada saat menjatuhkan putusan terhadap pelaku.

C. *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Yang Sah

Ilmu kedokteran dapat dimanfaatkan dalam rangka proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut, agar dapat membantu mengungkap perkara tindak

pidana yang menimbulkan korban manusia, salah satunya yaitu tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan adanya korban mati. Biasanya dokter ahli atau dokter forensik atau dokter yang sesuai dengan sumpahnya akan melakukan pemeriksaan dalam terhadap korban mati tersebut untuk mengetahui penyebab dan waktu kematian korban, yang antinya diharapkan berdasarkan pemeriksaan tersebut dapat terungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut. Adapun keterangan ahli adalah sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Alat bukti yang memuat keterangan ahli ini dapat diberikan secara lisan didepan sidang pengadilan sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa keterangan ahli tersebut dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika keterangan ahli itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang ahli diminta untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji didepan hakim.

Menurut Afandi, bedah mayat adalah pemeriksaan medis terhadap mayat dengan tujuan untuk menemukan penyebab kematian. Pemeriksaan ini dilakukan dengan membuka rongga kepala, leher, dada, perut dan panggul serta bagian tubuh lain bila diperlukan, serta dengan pemeriksaan jaringan dan organ tubuh di dalamnya, baik secara fisik maupun dengan dukungan pemeriksaan laboratorium.⁴⁸

Hasil dari bedah mayat tersebut diatas, dituangkan dalam *Visum Et Repertum*. *Visum Et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis resmi dari penyidik yang berwenang mengenai fakta temuan hasil pemeriksaan medik dan pendapat terhadap manusia, baik korban hidup atau korban mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya, dan dibawah sumpah, untuk kepentingan pengadilan.⁴⁹

Istilah dari *Visum Et Repertum* sendiri tidak diatur dalam KUHAP secara jelas, melainkan terdapat dalam Stbl.Tahun 1970 No. 350 tentang *Visa Reperta*. *Visa Reperta* merupakan bahasa latin yang memiliki arti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu; dan *Reperta* berarti laporan. Maka apabila diterjemahkan dengan arti kata, *Visa Reperta* berarti laporan yang dibuat berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu. *Visa Reperta*

⁴⁸ Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, *op.cit*, hlm.1

⁴⁹ Badan Diklat Kejaksaan R.I, *loc.cit*

juga merupakan bentuk tunggal dari *Visa Et Reperta*. Stbl. Tahun 1937 No. 350 secara lengkap menyatakan:⁵⁰

“*Visa Reperta* para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Indonesia, maupun atas sumpah khusus seperti tercantum dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350.”

Korban mati yang dimintakan *Visum Et Repertum* adalah korban yang diduga akibat kematian tidak wajar. Setiap kematian tidak wajar seharusnya dilakukan permintaan pemeriksaan mayat sehingga mendapatkan kejelasan mengenai identitas mayat, penyebab kematian, mekanisme kematian, perkiraan waktu kematian dan pendapat tentang cara kematiannya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa langkah atau tata cara permintaan *Visum Et Repertum*, sebagai berikut:⁵¹

a. Dasar Hukum

Prosedur permintaan *Visum Et Repertum* mayat (korban mati) telah diatur dalam Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”

Dan juga Pasal 134 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.”

⁵⁰ Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2017, hlm. 21

⁵¹ Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, *op.cit*, hlm.8-10

Dengan merujuk kedua Pasal dalam KUHP tersebut dapat diartikan bahwa permintaan *Visum Et Repertum* mayat berupa bedah jenazah, maka hukumnya “mutlak” atau tidak dapat ditolak. Apabila diperlukan pemeriksaan bedah mayat dan keluarga keberatan, maka penyidik wajib menjelaskan kepada keluarga korban hingga keluarga korban dapat memahami tujuan dan kepentingan pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal keluarga korban, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.”

Penyidik juga masih dapat menerapkan Pasal 222 KUHP dan Pasal 224 KUHP. Pasal 222 menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan Pasal diatas maka jelas dinyatakan keluarga korban yang menghalang-halangi penyidik dalam pemeriksaan atau pembedahan mayat untuk kepentingan pengadilan akan diberikan sanksi pidana. Pasal 224 menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Berdasarkan Pasal 224 KUHP diatas sudah jelas bahwa apabila seorang saksi, ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak hadir setelah

dipanggil secara patut oleh majelis hakim dalam halnya untuk memberikan kesaksian, maka akan dipidana.

b. Beritahu Keluarga Korban Bukan Meminta Persetujuan

Berdasarkan Pasal 134 KUHAP ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal keluarga korban, penyidik wajib menerangkan dengan sejas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut”

Berdasarkan Pasal diatas, maka seorang penyidik hanya mempunyai kewajiban menerangkan sejas-jelasnya tentang maksud dan tujuan diadakannya pemeriksaan bedah mayat tersebut. Dapat disimpulkan disini sekali lagi bahwa apabila penyidik sudah meminta untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat maka bersifat “mutlak” atau obligatory dan tidak dapat ditolak. Keluarga korban hanya diberitahu mengenai maksud dan tujuan bedah mayat sehingga tidak meminta persetujuan dari keluarga korban.

c. Buat Surat Permintaan *Visum Et Repertum*

1. Surat Permintaan Visum (SPV) ini ditunjukkan kepada RS Bhayangkara di daerah setempat atau RSUD atau RS Swasta jika tidak ada.
2. SPV dituliskan dengan jelas jenis pemeriksaannya, apakah pemeriksaan mayat atau bedah mayat. Pemeriksaan mayat saja tidak dapat menentukan penyebab kematiannya, sehingga seharusnya perihal isi surat adalah permintaan pemeriksaan bedah mayat.

3. SPV dituliskan jelas identitas mayat, atau jika belum diketahui identitasnya maka dapat ditulis “Mr. X” atau “Mrs. X”.
 4. SPV dituliskan pula keterangan singkat mengenai kejadian, waktu ditemukan, keterangan di TKP, cara kematian sementara, dan lain-lain. Namun apabila masih dalam penyidikan maka lebih baik kolom keterangan singkat mengenai kejadian dikosongkan saja.
 5. SPV dicap dengan cap dinas dan pejabat yang menandatangani *Visum Et Repertum* adalah penyidik seperti telah diatur dalam undang-undang (Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP).
- d. Kirim Mayat Ke Rumah Sakit
1. Pengiriman mayat ini harus sesegera mungkin, oleh karena semakin lama maka proses pembusukan juga berlangsung dan hasil pemeriksaan menjadi kurang optimal.
 2. Pengirim mayat harus diantar oleh penyidik sendiri. Jangan lupa menyertakan label mayat yang diikatkan pada ibu jari kaki kiri atau jika tidak ada maka pada bagian dari tubuh.
 3. Mengikuti pemeriksaan mayat oleh dokter. Dengan penyidik ikut dalam mengantar mayat dan turut serta selama dalam pemeriksaan akan memberikan keuntungan kepada penyidik oleh karena penyidik dapat memberi keterangan terkait kasusnya dan mendapatkan informasi yang terkini dari dokter pemeriksa. Hal tersebut juga sudah tertuang didalam instruksi Kapolri No. 20/E/INS/IX/75.

e. Pemeriksaan Oleh Dokter

Pemeriksaan bedah jenazah oleh dokter membutuhkan waktu kurang lebih 1-3 jam tergantung kesulitan kasusnya. Seorang dokter forensik akan melakukan pemeriksaan lebih teliti dan relatif lebih cepat oleh karena lebih banyak memiliki pengalaman. Hasil dari pemeriksaan dari seorang dokter forensik juga memiliki nilai yang “lebih” jika dibandingkan dengan dokter lainnya, hal ini terkait dengan pendidikan, pengalaman dan kompetensinya.

Selama dalam pemeriksaan seorang dokter akan menemukan petunjuk-petunjuk berkaitan dengan pemeriksaannya. Apabila perlu ia akan melakukan pemeriksaan penunjang dan atau mengambil beberapa sampel dari mayat untuk pemeriksaan lebih lanjut, untuk itu kehadiran dari penyidik memang diperlukan agar informasi terkini dapat diterima dan dapat segera ditindak lanjuti.

f. Hasil Pemeriksaan Dokter

Hasil pemeriksaan dokter dapat seketika itu pula dikeluarkan setelah pemeriksaan selesai dalam bentuk *Visum Et Repertum* sementara. Namun umumnya oleh karena berkaitan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan lainnya maka *Visum Et Repertum* Definitif memerlukan kisaran waktu antara 1-2 minggu tergantung rumit dan banyaknya kasus.

Pihak yang berwenang dalam mengajukan *Visum Et Repertum* ini adalah penyidik atau pihak yang berwenang dan memiliki kewenangan dalam

menangani kasus tindak pidana pembunuhan yang ditunjukkan atau diminta langsung kepada dokter ahli atau dokter forensik atau dokter yang sesuai sumah jabatannya secara langsung.

Untuk memastikan keadaan yang sebenarnya dari tubuh korban, maka dibutuhkanlah dokter forensik. Oleh karena itu, fungsi bantuan dokter dokter dalam pemeriksaan kedokteran forensik adalah sebagai berikut:

a. Pada tingkat penyelidikan perkara

Pada tahap ini, bermanfaat untuk menentukan tentang ada atau tidaknya peristiwa pidana pada saat ditemukannya tubuh manusia. Sebagai contoh ada mayat yang ditemukan menggantung di pohon, maka mayat tersebut akan diperiksa apakah meninggal karena gantung diri ataukah dibunuh lalu digantung. Untuk itu dokter akan melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat yang ditemukan tersebut, apakah ada tanda-tanda *asfiksia*, mata menonjol, lidah menjulur karena adanya penekanan pada leher, keluarnya *urine* dan *feses*, dan sebagainya. Apabila dari pemeriksaan luar tersebut ternyata tidak terbukti mayat meninggal karena gantung diri, maka kemungkinan besar mayat tersebut meninggal karena dibunuh dan mayatnya digantung untuk menghilangkan jejak kejahatan pelaku.

b. Mengungkap proses tindak pidana dan akibatnya

Untuk mengungkap proses tindak pidana dan akibatnya, kebenaran, cara-cara dan tanda-tanda yang terjadi seperti dalam contoh kasus diatas, tidaklah cukup pemeriksaan luar saja, tetapi memerlukan

pemeriksaan dalam atau pemeriksaan lanjutan seperti autopsi atau bedah mayat. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan terdapat tulang leher korban patah, sedangkan tulang leher patah dalam kasus gantung diri itu tidak lazim. Maka harus dilakukan juga pemeriksaan di tempat kejadian perkara atau biasa disingkat dengan TKP.

c. Menemukan identitas korban dan pelaku

Dalam kasus pemeriksaan mayat misterius, upaya menemukan identitas korban berperan penting untuk menemukan identitas pelaku, misalnya ditemukan mayat korban pembunuhan yang di mutilasi (dipotong dalam beberapa bagian), apabila potongan tubuh korban tampak rapi, maka penyelidikan akan diarahkan pada pelaku yang diduga berhubungan atau pernah berhubungan dengan bedah mayat manusia atau jagal binatang.